

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan unsur utama pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang di sengaja dan dipikirkan secara sistematis. Oleh karena itu, di setiap level manapun, kegiatan pendidikan harus di sadari dan direncanakan, baik dalam tataran nasional (*makroskopik*), regional (*mesoskopik*), institusional (*mikroskopik*) maupun operasional (proses pembelajaran).

Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Kemudian dalam pasal 35 ayat 1 dikatakan bahwa “Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”.¹

¹Undang-undang RI. No 20 Tahun 2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 1 ayat 1 dan pasal 35 ayat 1 (Bandung: Penerbit, Citra Umbara, 2009), h. 43

Pengelolaan atau manajemen adalah proses atau kegiatan orang-orang dalam organisasi dengan memanfaatkan sumber-sumber (juga disebut unsur manajemen yaitu sumber daya manusia, sumber keuangan, sarana atau perangkat kerja termasuk di dalamnya metode/teknologi dan material/bahan-bahan) yang tersedia bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga berarti ketrampilan dan kemampuan untuk memperoleh hasil melalui kegiatan bersama orang lain dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.² Jika dikaitkan dengan sekolah, maka manajemen sekolah adalah proses atau kegiatan orang-orang dalam sekolah atau madrasah dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah, sumber keuangan untuk pembiayaan sekolah, dan sarana serta prasarana yang tersedia untuk tercapainya tujuan sekolah.

Dalam proses pendidikan di butuhkan pengelolaan khususnya pengelolaan dalam pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang berorientasi pada tujuan, alternatif, dan efektivitas. Pendekatan sistem dalam pembiayaan pendidikan dimulai dengan penerapan PPBS (*Planning Programming Budgeting Systems*).

Pada pendekatan pembiayaan terdapat dua unsur yang saling berkaitan yaitu unsur eksternal yang mencerminkan suatu subsistem lingkungan yang lebih luas dan unsur internal yang menggambarkan sistem itu sendiri. Subsistem eksternal mengandung masalah-masalah umum dan subsistem internal mencakup

²Azhar Arsyad, *Pokok-pokok Manajemen; pengetahuan praktis bagi Pimpinan dan Eksekutif* (Cet 2: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). h. 4.

perencanaan, penyusunan program, penyusunan anggaran, administrasi program, dan pengawasan program.

Pendekatan sistem terhadap pembiayaan telah dimulai pada saat melakukan perencanaan dengan penentuan satuan-satuan biaya yang diperoleh dari hasil analisis biaya, sampai dengan pengawasan program dengan menentukan satuan biaya terhadap sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau suatu program. Hasil perhitungan biaya dapat dibandingkan mana yang lebih kecil, yang lebih besar, dan yang sama besar dengan mendasarkan kepada hasil pelaksanaan program. Disinilah akan tampak tingkat efisiensi dan efektivitas suatu lembaga pendidikan.³

Salah satu aspek yang digarap oleh sekolah sesuai dengan model ini adalah manajemen keuangan dan pembiayaan, karena tentu sekolah lebih memahami apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga desentralisasi pengalokasian dan penggunaan uang untuk pembiayaan kegiatan pendidikan sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah. Sekolah diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan (*income generating activities*), sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada iuran wajib siswa atau bantuan dari pemerintah semata.

Biaya pendidikan adalah salah satu unsur penting dari terlaksananya penyelenggaraan pendidikan. manajemen pembiayaan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan semua program pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan. Jika suatu kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang relatif rendah,

³Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan aplikasinya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 1.

tetapi menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, maka hal ini dapat dikatakan bahwa manajemen pembiayaan dalam lembaga tersebut telah berjalan dengan baik. Karena ternyata rendahnya produk atau *output* yang dihasilkan suatu lembaga bukan semata karena minimnya anggaran sekolah yang mendukung tetapi lebih kepada manajemen pembiayaan yang kurang efektif. Oleh sebab itu, belum menjadi jaminan, sekolah dengan biaya mahal akan menghasilkan *output* yang bagus, begitu juga sebaliknya sekolah dengan biaya yang murah belum tentu menghasilkan *output* yang buruk.⁴

Pembiayaan pendidikan harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya sehingga tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran. Begitu pula adanya keterbatasan penyediaan dana merupakan hambatan di dalam usaha peningkatan kualitas program pendidikan. Terkait dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Isra'/17:26-27.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Penghematan biaya wajib dilakukan berdasarkan analisis biaya dan perhitungan alokasi biaya pendidikan (pembiayaan pendidikan) ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan dan biaya satuan. Komponen kegiatan pendidikan meliputi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang belajar, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, alat pelajaran, buku pelajaran, perabot sekolah, perlengkapan sekolah, dan alat tulis menulis. Termasuk juga proses belajar mengajar, gaji guru, dan gaji pegawai lainnya. Di dalam analisis biaya, komponen

⁴*Ibid.*, h. 1.

ini dirinci sampai kegiatan terkecil untuk dapat ditentukan jumlah dan biaya satuannya sehingga tepat sasaran.

Pembiayaan pendidikan dalam Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan pasal 100 ayat 1 menyatakan bahwa: “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”.⁵ Pencapaian pembiayaan terhadap program pendidikan yang berkualitas harus melalui tahapan-tahapan manajemen pembiayaan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, alokasi penggunaan anggaran, sampai evaluasi dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana yang diperoleh sekolah benar-benar dimanfaatkan secara tertib, efektif, efisien, tranparan dan akuntabel.

Manajemen pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen pendidikan secara keseluruhan, karena pada hakekatnya anggaran dan pembiayaan sekolah merupakan penjabaran dari program sekolah dalam bentuk angka-angka yang akan dipertanggungjawabkan bersama pencapaian program pada akhir tahun anggaran. Pendekatan sistem perencanaan, analisis kebutuhan, analisis biaya, sampai pada evaluasi sebelum, sesudah dan setelah pelaksanaan penggunaan anggaran pembiayaan program pendidikan lalu mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel terhadap penggunaan anggaran sekolah.

Anggaran sekolah didapatkan dari dua sumber pembiayaan, pemerintah dan non pemerintah. Selain berasal dari pemerintah juga dari non pemerintah

⁵Perda Kutai Kartanegara, Nomor 15 Tahun 2010 *Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan*, pasal 100 ayat 1.

yaitu partisipasi iuran orang tua siswa dan masyarakat umum secara perorangan maupun melalui lembaga atau organisasi. Orang tua siswa adalah sumber pembiayaan pendidikan cukup potensial di luar pemerintah khususnya bagi sekolah swasta. Orang tua siswa pada umumnya tidak keberatan menyediakan sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan dengan harapan bahwa anaknya akan memperoleh pelayanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Sikap orang tua siswa yang demikian sangat menguntungkan karena dapat membantu dalam pembiayaan pendidikan apa lagi bagi sekolah swasta, mengingat pemerintah memiliki banyak keterbatasan dalam hal membantu pembiayaan pendidikan swasta.

Dalam peraturan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan pasal 98 ditegaskan bahwa “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, pemangku kepentingan/masyarakat. Tanggung jawab pendanaan pendidikan dalam katagori orang tua miskin tidak diberikan tanggung jawab dalam pengembangan Pendidikan”.⁶

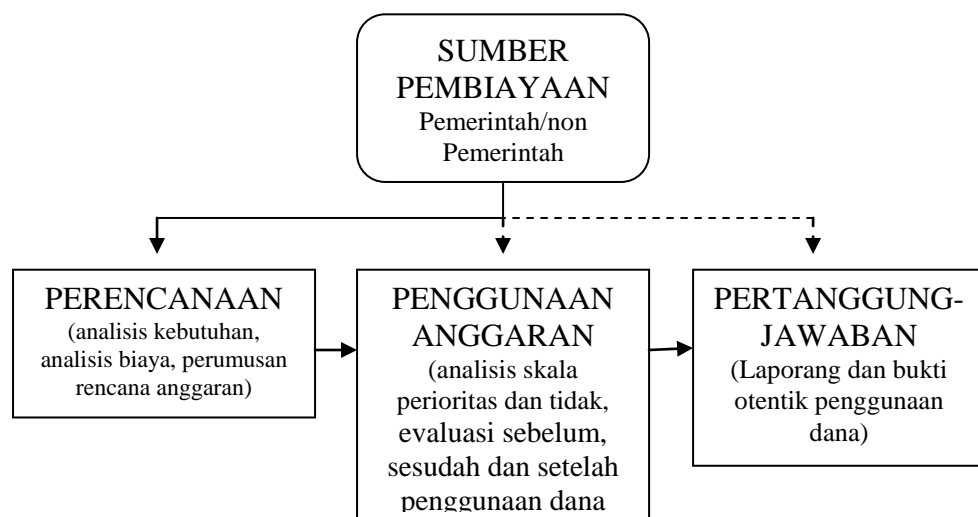
Pemerintah Kutai Kartanegara sudah mencoba berbagai program dalam menyikapi pembiayaan pendidikan, namun bagi sekolah swasta sumber pembiayaan dari orang tua merupakan sumber yang sangat berperan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan didukung oleh sarana prasarana pembelajaran yang memadai. Biaya pendidikan yang berasal dari orang tua, bukan saja berupa uang tetapi juga berupa peralatan atau fasilitas

⁶*Perda Kutai Kartanegara, Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 98 ayat 1-2.*

lainnya. Hal ini sulit untuk didata, kecuali secara formal menjadi kewajiban mereka. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa ialah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (SBP3), Sumbangan Pembangunan, dan Sumbangan sumbangan lainnya.⁷

Di sinilah pentingnya manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal-hal yang berkaitan dengan ini meliputi perencanaan anggaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan. Dari keterangan di atas dapat digambarkan proses manajemen pembiayaan pendidikan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Proses Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah/madrasah



⁷Matin, *Manajemen*..... h. 14

Dalam melakukan pertanggungjawaban pengelolaan pelaksanaan keuangan pendidikan tersebut harus golongan menurut suatu aturan tertentu yang baku, dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan harus diringkas dan dilaporkan kepada pihak terkait penyalur sumber pembiayaan. Kegiatan ini disebut sebagai akuntansi dalam pembiayaan pendidikan. Membuat akuntansi keuangan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun transaksi keuangan tidak diatur dalam suatu peraturan, namun pertanggungjawaban keuangan dituntut dengan akuntansi yang jelas dan mudah dipahami.

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Negeri di Kutai Kartanegara berjumlah 436 sekolahan, dan jumlah siswa 76.033 dibawah penanganan 7.429 guru. Sementara jumlah sekolah SD/MI swasta di Kutai Kartanegara sejumlah 18 sekolah dengan jumlah siswa 3.329 dengan tenaga guru 287 orang. Kecamatan Tenggarong sebagai lokasi penelitian memiliki sekolah dasar negeri berjumlah 38 dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri sebanyak 1 sekolah, jumlah keseluruhan siswa 10.270 orang. Sementara jumlah SD/MI swasta yang berada di kecamatan tenggarong sebanyak 4 sekolah yang terdiri dari 2 sekolah dasar yang beranung dibawah kementerian pendidikan dan 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta yang bernaung dibawah kementerian agama dengan jumlah siswa keseluruhan pada jenjang SD/MI swasta sebanyak 3.329 orang siswa.⁸

⁸BPS, *Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Kartanegara* (2015) h. 69-70

Sekolah/madrasah Swasta khususnya di kabupaten Kutai Kartanegara masih memerlukan dukungan pemerintah daerah maupun pusat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara maksimal. Sekolah swasta yang bernaung dibawah payung hukum yayasan baik yang bersifat independen atau yang berafiliasi dengan organisasi masyarakat (Ormas) seperti NU dan Muhammadiyah atau lainnya, merupakan sekolah yang membiayai dirinya sendiri melalui beberapa sumber.

Sumber keuangan dan pembiayaan pada sekolah swasta secara garis besar dapat dikelompokkan atas beberapa sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat melalui APBN melalui Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pemerintah daerah melalui APBD bidang pendidikan. (2) orang tua dan masyarakat; (3) dana masyarakat, (4) usaha ekonomi sekolah/madrasah, (4) sumber lain yang tidak mengikat⁹ unsur ini saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan berkualitas sangat diharapkan oleh semua pihak, namun di sisi lain banyak pihak yang merasa keberatan untuk mengeluarkan dana sebagai sumber pembiayaan pendidikan khususnya bagi sekolah swasta. Ironisnya masyarakat sering berdalih, pendidikan adalah tanggungan pemerintah sehingga tidak ada usaha untuk menggali sumber pembiayaan sekolah yang bersifat mandiri, sementara sumber pembiayaan sekolah yang berasal dari pemerintah hanya bersifat sesuai dengan regulasi aturan yang sudah ada dan terbatas bagi

⁹Departemen Agama R.I, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Aliyah*. (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2005), h. 55-56

sekolah swasta. Sementara kualitas pendidikan tetap menjadi tuntutan bagi setiap lembaga pendidikan khususnya bagi sekolah swasta.

Kualitas pendidikan akan baik ketika didukung oleh pembiayaan yang mencukupi. Guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas diperlukan pembiayaan secara optimal. Akan tetapi, kenyataan di lapangan sebagian masyarakat terkadang tidak mau tahu status sekolah itu negeri atukah swasta jika telah mendengar program sekolah gratis dari pemerintah khususnya di kabupaten Kutai Kartanegara, maka spontan berasumsi semua gratis, yang jadi masalah adalah sekolah swasta karena pembiayaan bertumpu dari dukungan masyarakat, sekolah swasta memiliki keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan dan pemerintah daerah hanya mengeluarkan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) sebagaimana jumlah siswa dalam suatu lembaga bukan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Bagi sekolah swasta yang lebih dulu maju dengan kuantitas siswa yang banyak, maka sekolah tersebut dapat memperoleh kekuatan sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Tetapi bagi sekolah swasta yang baru merintis dan kuantitas siswanya masih sedikit, maka harus mengandalkan kekuatan operasional sekolah dari iuran wajib siswa per bulannya yang terkadang tidak sebanding dengan kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan. Adapun bantuan operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah kabupaten (BOSKAB) terkadang tidak menentu tergantung dari kondisi keuangan pemerintah kabupaten. Bisa cair juga bisa tidak, walaupun cair itu pun sering terjadi keterlambatan akibat permasalahan teknis yang terlalu panjang.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembiayaan sekolah swasta sangat tergantung dari dukungan partisipasi orang tua siswa dalam tertib administrasi biaya iuran wajib siswa per bulannya. Jika partisipasi orang tua siswa kurang tertib, atau sering terjadi keterlambatan dalam memenuhi kewajiban administrasi, maka tentu akan menjadi masalah yang sangat pelik dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya lembaga pendidikan swasta. Sementara sekolah memerlukan pembiayaan untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan pendidikan dan kebutuhan sarana pembelajaran dan sarana sekolah.

Finansial memang bukan segala-galanya, tetapi segala kegiatan pendidikan memerlukan finansial. Sebagaimana dalam jurnal Raj Mestry menyatakan *“further points out that in many schools where parents have limited skills, knowledge or experience, and even lower levels of literacy, they might find difficulty in assuming responsibility for managing the financial resources of the school.”*¹⁰ Oleh karena itu untuk tidak terjadi masalah yang dapat menghambat pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, maka manajemen pembiayaan harus mengacu pada prinsip perencanaan, penyusunan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran pendidikan. Penyusunan anggaran harus benar-benar sesuai hasil analisis kebutuhan biaya dari sumber pembiayaan yang sudah pasti. Kemudian dipergunakan sebagaimana program pendidikan dan di pertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Setiap upaya pembiayaan untuk pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, ketersediaan pembaiyaan

¹⁰Raj Mestry, *Collaboration for the effective and efficient management of school financial resources*, (DOI: 10.1080/18146627.2013.853539, Africa: Unisa press, 2013) h. 433.

pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Lebih lanjut diketahui bahwa hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan pembiayaan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Di era persaingan ini, bagi sekolah swasta diperlukan inovasi-inovasi khusus dalam penggalian sumber pembiayaan dengan menggunakan ilmu manajemen pembiayaan pendidikan demi kelangsungan dan perkembangan lembaga swasta yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam keberhasilan suatu lembaga pendidikan, sebagai gambaran terkait permasalahan diatas, diadakan studi pendahuluan berdasarkan sumber pembiayaan yang bersumber dari SPP terhadap 3 sekolah swasta yang menjadi studi lapangan penelitian yaitu SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, SD Muhammadiyah Tenggarong (SDM Tenggarong) dan Madrasah Ibtidaiyah Asy Syauqi (MI Asy Syauqi Tenggarong).

SD Islam Terpadu Nurul Ilmi Tenggarong (SDIT Nurul Ilmi) menerapkan kebijakan iuran wajib siswa per bulan sebesar Rp. 250.000 ribu status sekolah terakreditasi A dengan jumlah siswa 740 orang. Adapun SD Muhammadiyah Tenggarong menentukan kebijakan iuran wajib siswa dengan beberapa pilihan, mulai dari Rp. 250.000 paling rendah sampai Rp. 300.000 ke atas sesuai kemampuan orang tua wali berdasarkan pekerjaan dan kesanggupan di awal masuk sekolah, status terakreditasi A dengan jumlah siswa 1290 siswa. Sedangkan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Asy Syauqi Tenggarong menentukan kebijakan iuran wajib siswa sebesar Rp. 125.000 dengan jumlah

siswa 215 orang dan masih dalam proses usaha menuju stataus akreditasi.¹¹ Adapun bantuan operasional sekolah (BOS) baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, ketiga sekolah teresbut sama-sama mendapatkan bantuan sesuai dengan jumlah siswa dan ketentuan yang berlaku.

Namun dari ketiga lembaga tersebut ada perbedaan mekanisme pengelolaan keuangan khususnya keuangan yang bersumber dari non pemerintah khususnya sumber dana dari partisipasi iuran wajib siswa per bulan. SDIT Nurul Ilmi Tenggarong mengelola sendiri sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Adapun SD Muhammadiyah Tenggarong dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kutai Kartanegara (PDM Kukar) menerapkan kebijakan keuangan satu atap. Jadi pemasukan yang bersumber dari partisipasi siswa dan dana lainnya yang bersifat non pemerintah langsung dikelola oleh Majelis Ekonomi PDM Kukar, sekolah hanya bisa mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan sekolah sesuai dengan RKAS yang telah disepaki bersama. SD Muhammadiyah hanya mengelola sendiri sumber biaya dari pemerintah atau BOS. Sementara MI Asy Syauqi kurang lebih dengan SD Muhammadiyah, tetapi perbedaanya MI Asy Syauqi terdapat pemisahan kebijakan keuangan antara pihak sekolah dengan yayasan. MI Asy Syauqi tidak dapat ikut campur dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari non pemerintah, semua dikelola dan dialokasikan berdasarkan kebijakan dari pimpinan yayasan. Begitu juga dengan sumber

¹¹Hasil studi pendahuluan dengan kepala sekolah SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, kepala sekolah SD Muhammadiyah Tenggarong dan kepala Sekolah MIS Asy Syauqi Tenggarong Tanggal 7 November 2015.

pembiayaan dari pemerintah atau dana BOS. langsung dikelola oleh pihak sekolah tanpa yayasan ikut campur dalam perencanaan penggunaannya.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh gambaran beberapa sumber pembiayaan bagi masing-masing lembaga tersebut dan cara pengelolaan keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. ini artinya ada perbedaan dalam manajemen pembiayaan dari ketiga lembaga sekolah tersebut yang menimbulkan pertanyaan apakah dari ketiga lembaga sudah menerapkan proses-proses dalam manajemen pembiayaan pendidikan ataukah tidak?, jika tidak maka tentu akan berdampak pada hasil pencapaian tujuan pendidikan yang kurang maksimal meskipun ditopang dengan pembiayaan yang relatif besar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimana manajemen pembiayaan yang dilakukan di tiga lembaga pendidikan tersebut dengan judul: ***”Manajemen Pembiayaan SD/MI Swasta di Kecamatan Tenggarong (Studi pada: SDIT Nurul Ilmi, SD Muhammadiyah, dan MI Asy Syauqi).***

B. Fokus Penelitian

Dari paparan diatas maka diperoleh gambaran tentang masalah manajemen pembiayaan pendidikan yang begitu kompleks dalam suatu lembaga pendidikan khususnya lembaga swasta di kabupaten Kutai Kartanegara. Namun karena keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan peneliti, maka ditentukan fokus penelitian sebagai berikut:

¹²*Ibid.*

1. Bagaimana proses perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, SD Muhammadiyah Tenggarong, dan MI Asy Syauqi Tenggarong?
2. Kemana alokasi penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, SD Muhammadiyah Tenggarong, dan MI Asy Syauqi Tenggarong?
3. Bagaimana alur pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, SD Muhammadiyah Tenggarong, dan MI Asy Syauqi Tenggarong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses perencanaan anggaran pembiayaan di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, SD Muhammadiyah Tenggarong, dan MI Asy Syauqi Tenggarong.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis alokasi penggunaan anggaran pembiayaan di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, SD Muhammadiyah Tenggarong, dan MIS Asy Syauqi Tenggarong.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis alur pertanggungjawaban pembiayaan di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, SD Muhammadiyah Tenggarong, dan MI Asy Syauqi Tenggarong.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak peneliti maupun bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan secara akademik. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam mengembangkan dan memajukan dunia pendidikan khususnya yang berhubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di tingkat sekolah dasar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepala sekolah maupun kepala madrasah dan pengelola lembaga pendidikan lainnya yang terlibat agar terlaksana manajemen pembiayaan pendidikan secara baik di sekolah masing-masing.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi komite sekolah dan yayasan agar lebih memahami kinerja dan perannya dalam mendukung manajemen pembiayaan lembaga pendidikan.

E. Definisi Istilah

Untuk membatasi sehingga tidak terjadinya salah penafsiran dalam penelitian ini, maka diberikan definisi istilah sebagai batasan sekaligus penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Penegasan istilah ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian dalam fokus penelitian ini. Adapun definisi operasional judul sebagai berikut:

1. Manajemen pembiayaan yang dimaksud merupakan kegiatan pengelolaan dalam rangka mengelola sumber pembiayaan pendidikan yang meliputi aspek proses perencanaan penganggaran, alokasi penggunaan anggaran, dan alur pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan memiliki cakupan yang luas, adapun ruang lingkup biaya pendidikan dalam penelitian ini membatasi hanya pada biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh melalui dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS/RKAM).
2. SD/MI Swasta adalah sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang berpayung hukum akta notaris yayasan dan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenKumHam) dikenal sebagai sekolah independen tidak dikelola oleh pemerintah daerah, negara bagian atau nasional. Mereka memperoleh hak mengelola dan menyeleksi siswa dan didanai seluruhnya atau sebagian dengan membebaskan biaya sekolah kepada siswa, daripada bergantung pada dana pemerintah yang dalam hal ini adalah sekolah dasar

swasta SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, SD Muhammadiyah Tenggarong dan MI Asy Syauqi Tenggarong.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi sebagai bahan telaah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Noor Jennah (2014) berjudul *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong* (Studi Kasus Pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat menengah di kecamatan murung pudak kabupaten tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran pembiayaan pendidikan dari keempat sekolah yang diteliti dimulai dengan adanya penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah/madrasah (RKAS/RKAM) yang dilakukan setiap tahun. Keempat sekolah mengalokasikan anggaran terbesar untuk memenuhi gaji pegawai dan alokasi anggaran terkecil untuk peningkatan kompetensi guru, sedangkan alokasi anggaran untuk sarana pembelajaran, sarana sekolah, pengelolaan, dan kegiatan kesiswaan berbeda antara masing-masing sekolah. Berdasarkan analisis cost effectiveness, SMAN 1 Tanjung merupakan sekolah yang paling efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan pembiayaan pendidikan pada tahun 2013 dibandingkan ketiga sekolah lainnya; dana yang diberikan

pemerintah ataupun yayasan disalurkan langsung ke rekening sekolah/madrasah, selanjutnya dana yang telah diperoleh tersebut digunakan untuk melaksanakan program kegiatan yang ada dalam RKAS/RKAM; keempat sekolah mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan pembiayaan pendidikan kepada pemerintah pusat (Kemendiknas/kemenag) maupun dinas pendidikan kabupaten Tabalong.¹³

2. Penelitian Ni Luh Kadek Supartini (2012) berjudul *Analisis Satuan Biaya Pendidikan SMAN 1 Sukawati Tahun Pelajaran 2010/2011*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran satuan biaya pendidikan dan besaran satuan biaya pendidikan persiswa (unit cost) di SMAN 1 sukawati, serta korelasi antara standar biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pembelajaran guru. Hasil penelitian menunjukkan satuan biaya pendidikan SMAN 1 sukawati Rp. 5.157.347.9000,00 dan satuan biaya pendidikan persiswa Rp. 6.683.151, 74 pada tahun pelajaran 2010/2011. Penggunaan dana terbesar untuk biaya operasional personal, kemudian untuk biaya operasional non personal, biaya investasi, beasiswa dan bantuan. Terjadi peningkatan biaya pendidikan SMAN 1 sukawati dalam pencapaian standar nasional pendidikan, serta terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetesni guru terhadap mutu pembelajaran.
3. Anis Wahyu Harnanik (2008) *Manajemen Sumber Dana* (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah Singosari Malang). Hasil penelitian ini menunjukkan

¹³Noor Jennah, “*pengelolaan pembiayaan pendidikan di kecamatan murung pudak kabupaten tabalong (studi kasus pada jenjang pendidikan tingkat menengah)*” (Tesis tidak diterbitkan program pascasarjana IAIN antasari, banjarmasin, 2014).

bahwa manajemen sumber dana di Pondok pesantren Al-Ishlahiyah Singosari Malang tahun ajaran 2008/2009 diimplementasikan dengan tahapan perencanaan yang terdiri atas perencanaan (Penyusunan anggaran), pelaksanaan program serta monitoring (Evaluasi) dengan tetap berpegangan pada model “*open management*” terhadap pengelolaan sumber-sumber dana yang ada (Pemerintah (*World bank*), masyarakat (Syahriyah santri/wati), unit usaha koperasi/kantin, wartel dan mebel), dibekali dengan planning dan thinking strategy lewat pengadaan program pelatihan (In-service training) bagi tenaga kependidikannya.

4. Rachman Firdaus (2004) Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dan Mutu Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Swasta (Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Bahasa Asing, LIA, MMC, ELS dan Cinderella di Bandung Tahun 2002–2003). Hasil temuan penelitian antara lain: Pertama, proses penyusunan pembiayaan pendidikan secara umum mempertimbangkan komponen-komponen mandat lembaga, tuntutan stakeholders, dan tuntutan pesaing. Kedua, upaya strategis dalam menggali sumber-sumber dana dari masyarakat ditempuh melalui dua pendekatan strategis yaitu pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Ketiga, proses pengawasan kinerja Lembaga dilaksanakan berkaitan dengan akuntabilitas terhadap mutu pendidikan, dengan cara evaluasi dan analisis. Keempat, mutu pendidikan menunjukkan keterkaitan yang erat dengan ketersediaan dana. Sistem pembiayaan yang

efektif efisien dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjamin kelangsungan hidup Lembaga Pendidikan.¹⁴

Hal itu menunjukkan bahwa beberapa penelitian diatas telah dilakukan penelitian terkait pembiayaan sekolah di indonesia, namun penelitian mengenai manajemen pembiayaan SD/MI swasta khususnya pada jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah swasta di kecamatan Tenggarong yaitu di SDIT Nurul Ilmi kecamatan Tenggarong, SD Muhammadiyah Tenggarong dan MI Asy Syauqi Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang menurut sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Inilah yang membedakan dengan penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definsisi Istilah, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab II kajian pustaka, meliputi Manajemen dalam Pendidikan: Konsep Manajemen, Fungsi-fungsi Manajemen. Konsep Pembiayaan Pendidikan: Konsep Pembiayaan, Asas-asas Pembiayaan Pendidikan, Jenis Pembiayaan, Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Model- model Pembiayaan Pendidikan,

¹⁴Rachman Firdaus, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dan Mutu Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Swasta (Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Bahasa Asing, LIA, MMC, ELS dan Cinderella di Bandung Tahun 2002 – 2003)*. (Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2004).

Sumber Biaya Pendidikan, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Biaya Pendidikan. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan Sekolah: Perencanaan Anggaran Pembiayaan Pendidikan, Penggunaan Anggaran Pembiayaan Pendidikan, Pengawasan Anggaran Pembiayaan Pendidikan, Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan.

Bab III metode penelitian, meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data.

Bab IV paparan data penelitian, meliputi gambaran lokasi penelitian, dan deskripsi hasil penelitian. Kemudian pembahasan yang meliputi analisis dan pembahasan terkait hasil penelitian.

Bab V penutup, yang meliputi simpulan dan saran-saran.